ABSTRAK

IRMA KARISMA, 12103173018, Problematika Penganggaran dalam Penyelenggaraan Jalan Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Sistem Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Tulungagung, 2022, Pembimbing: Ahmad Gelora Mahardika, M.H.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Daerah, Sistem Perundang-Undangan.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan penganggaran dalam penyelenggaran jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan perundang-undangan yang sudah mengaturnya, penyelenggaraan jalan berupa pembangunan jalan di Desa Ariyojeding dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Namun, pada kenyataannya selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kerusakan jalan yang berada di sebelah barat Kantor Desa Ariyojeding belum ada perbaikan atau tindakan apa-apa dari pihak yang terkait untuk mengatasi masalah tersebut.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Sistem Perundang-Undangan? 3) Bagaimana problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan *Fiqh Siyasah*?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung 2) Menganalisis problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Sistem Perundang-Undangan 3) Menganalisis problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan *Fiqh Siyasah* di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan 3 (tiga) tahap model yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraan Jalan yang berada di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan belum dilaksanakannya perbaikan jalan selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan

tahun 2022 kerusakan jalannya. Padahal, hal tersebut menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas PUPR bidang Bina Marga untuk segera melaksanakan perbaikan jalan. 2) Penyelenggaraan Jalan di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung belum sesuai Sistem Perundang-Undangan yaitu dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan serta diatur juga dalam pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas PUPR Tulungagung. Hal ini disebabkan dalam penyelenggaraan jalan di Desa Ariyojeding Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung mengalami beberapa kendala yaitu salah satunya terdapat masalah dalam penganggaran untuk melaksanakan perbaikan jalan, sehingga menyebabkan jalan rusak tersebut sampai sekarang belum bisa diperbaiki. Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penyusunan penganggaran terdapat prinsip-prinsip penyusunan APBD yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja. Sedangkan, dalam penyelenggaraan jalan di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dalam penyusunan anggarannya masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. 3) Ditinjau dari pandangan *Fiqh* Siyasah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dalam hal mengatasi permasalahan penganggaran pada penyelenggaraan jalan di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan salah satu prinsip-prinsip yang ada di dalam kajian *Fiqh* Siyasah Dusturiyah yaitu prinsip musyawarah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Asy Syura ayat 38. Akan tetapi, masih belum sesuai dengan 3 (tiga) prinsip yang ada di dalam kajian *Fiqh* Siyasah Dusturiyah yaitu prinsip hak dan kewajiban negara yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang menerangkan mengenai permasalahan hubungan antara hak dan kewajiban negara dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyatnya, prinsip keadilan yang diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yaitu mengenai pemerintah yang belum bisa menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya, dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 menerangkan tentang pemerintah yang harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

ABSTRACT

IRMA KARISMA, 12103173018, Budgeting Problems in Road Implementation by Local Governments Based on the Statutory System and *Fiqh Siyasah* (Case Study in Ariyojeding Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency), Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Tulungagung, 2022, Supervisor: Ahmad Gelora Mahardika, M.H.

Keywords: Road Administration, Local Government, Statutory System.

This research is motivated by budgeting problems in road implementation which is the authority of the Tulungagung Regency Regional Government through the Tulungagung Regency PUPR Office. Based on the laws that have regulated it, the implementation of roads in the form of road construction in Ariyojeding Village is carried out by the Tulungagung Regency PUPR Office. However, in reality for 4 (four) years, namely from 2019 to 2022, the damage to the road west of the Ariyojeding Village Office has not been repaired or taken any action from the relevant parties to overcome the problem.

The formulation of the problem: 1) How is the problems of budgeting in road administration by the Regional Government at Ariyojeding Village, Rejotangan, Tulungagung? 2) How is the budgeting problems in road administration by the Regional Government at Ariyojeding Village, Rejotangan, Tulungagung based on the Legislative System? 3) How is the budgeting problems in road administration by the Regional Government at Ariyojeding Village, Rejotangan, Tulungagung based on *Siyasah Fiqh*?. The objectives of this research are: 1) Describe the budgeting problems in road administration by the Regional Government at Ariyojeding Village, Rejotangan, Tulungagung 2) Analyze budgeting problems in road administration by the Regional Government at Ariyojeding Village, Rejotangan, Tulungagung based on the Legislative System 3) Analyzing budgeting problems in road administration by the Regional Government based on *Fiqh Siyasah* at Ariyojeding Village, Rejotangan, Tulungagung.

The research method used by the researcher is an empirical juridical method. The data collection techniques used in this study were in the form of interviews, observations and documentation. In the data analysis technique, researchers use 3 (three) stages of the model, namely data condensation, data presentation and drawing conclusions. As for checking the validity of the researcher's data using the triangulation method.

The results of this study show that: 1) The implementation of roads located in Ariyojeding Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency has not been carried out properly. This is proven by the non-implementation of road repairs for 4 (four) years, namely from 2019 to 2022 road damage. In fact, this is the authority of the Tulungagung Regency Government through the PUPR Office in the field of Highways to immediately carry out road repairs. 2) The implementation of roads in Ariyojeding Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency, which is carried out by the Tulungagung Regency Regional Government through the Tulungagung Regency PUPR Office, has not

been in accordance with the Statutory System, namely in Article 24 paragraphs (1) and (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Roads and is also regulated in article 10 of Regent Regulation Number 60 of 2019 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures, Tulungagung PUPR Office. This is because in the implementation of roads in Ariyojeding Village, the PUPR Office of Tulungagung Regency has experienced several obstacles, one of which is that there are problems in budgeting to carry out road repairs, causing the damaged road until now cannot be repaired. Meanwhile, in the implementation of good governance in the preparation of budgeting, there are principles for the preparation of the APBD contained in Government Regulation (PP) Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management which consists of the principles of budget transparency and accountability, budget discipline, budget fairness, budget efficiency and effectiveness, and a budget prepared with a performance approach. Meanwhile, in the implementation of roads in Ariyojeding Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency, in the preparation of the budget, it is still not in accordance with these principles. 3) Viewed from the view of Fiqh Siyasah, the Tulungagung Regency Regional Government through the Tulungagung Regency PUPR Office in terms of overcoming budgeting problems in road implementation in Ariyojeding Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency, is in accordance with one of the principles in the Fiqh study. Siyasah Dusturiyah is the principle of deliberation contained in the Qur'an Surat Asy Shura verse 38. However, it is still not in accordance with the 3 (three) principles in the study of Fiqh Siyasah Dusturiyah, namely the principle of state rights and obligations contained in the Qur'an Surat An-Nisa paragraph 59 which explains the problem of the relationship between the rights and obligations of the state in carrying out the mandate given by its people, the principle of justice explained in the Qur'an Surat An-Nisa verse 58, namely regarding the government that has not been able to carry out the mandate that has been given to him, and the principle of amar ma'ruf nahi mungkar contained in the Quran Surat Ali Imran verse 104 explains about the government that must obey the existing laws and regulations.

ملخّص

إيرما كاريسما، ١٢١٠٣١٧٣٠١٨، المشكلات الميزانية في تنفيذ الشارع من قبل الحكومات المحلية استنادًا إلى النظام التشريعي والفقه السياسى (دراسة الحالة في قرية أريو جدينح، دائرة رجوتاعان، تولونج أجونج)، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة تولونج أجونج الإسلامية الحكومية، ٢٠٢٢، المشرف: أحمد جلورا مهارديكا، الماجستير.

الكلمات الرئيسية:، تنفيذ الطرق، تنفيذ الشارع، النظام التشريعي.

خلفية هذا البحث هي من مشكلة الميزانية في تنفيذ الشارع والتي هي سلطة حكومة تولونج أجونج من خلال خدمة PUPR تولونج أجونج. بناءً على التشريع الذي نظمها، يتم تنفيذ الشارع في شكل بناء الشارع في قرية أريو جدينح من خدمة PUPR في تولونج أجونج .ومع ذلك، في الواقع لمدة ٤ (أربع) سنوات، من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢، الأضرار التي لحقت بالطريق إلى الغرب من مكتب قرية أريوجدينج ولم يكن هناك أي إصلاح أو إجراء من الأطراف اللازمة للتغلب على المشكلة.

مسائل البحث: ١) كيف المشكلات الميزانية في تنفيذ الشارع من قبل الحكومات المحلية في قرية أريو جدينح، دائرة رجوتاعان، تولونج أجونج؟ ٢) كيف المشكلات الميزانية في تنفيذ الشارع من قبل الحكومات المحلية في قرية أريو جدينح، دائرة رجوتاعان، تولونج أجونج على أساس النظام التشريعي؟ ٣) كيف المشكلات الميزانية في تنفيذ الشارع من قبل الحكومات المحلية في قرية أريو جدينح، دائرة رجوتاعان، تولونج أجونج على أساس الفقه السياسى؟ أهداف هذا البحث هي: ١) وصف المشكلات الميزانية في تنفيذ الشارع من قبل الحكومات المحلية في قرية أريو جدينح، دائرة رجوتاعان، تولونج أجونج ٢) تحليل المشكلات الميزانية في تنفيذ الشارع من قبل الحكومات المحلية في قرية أريو جدينح، دائرة رجوتاعان، تولونج أجونج على أساس النظام التشريعي ٣) تحليل المشكلات الميزانية في تنفيذ الشارع من قبل الحكومات المحلية على أساس الفقه السياسي في قرية أريو جدينح، دائرة رجوتاعان، تولونج أجونج.

منهج البحث الذي استخدمته الباحثة هي الطريقة القانونية التجريبية. طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. في طريقة تحليل البيانات، استخدمتة ثلاث مراحل للنموذج وهي تكثيف البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. وأما التحقق من صحة البيانات فاستخدمت الباحثة طريقة التثليث.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن: ١) تنفيذ الطريق في قرية أريوجدينج، رجوتاعان، تولونج أجونج لم يتم تنفيذه بشكل صحيح. ثبت ذلك من خلال حقيقة أن إصلاحات الطرق لم يتم تنفيذها لمدة ٤ (أربع) سنوات، أي من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢ أضرار الطريق. في الواقع، إنها سلطة حكومة للطرق السريعة لتنفيذ إصلاحات الطرق على الفور. ٢) PUPR من خلال مكتب تولونج أجونج الذي نفذته حكومة تولونج أجونج تنفيذ الطريق في قرية أريوجدينج، رجوتاعان، تولونج أجونج لم يكن متوافقًا مع النظام التشريعي، وبالتحديد في المادة ٢٤ من خلال مكتب تولونج أجونج الفقرة (١) والفقرة (٢) من يتم تنظيم القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن المرور والطرق أيضًا في اللائحة التنظيمية رقم ٦٠ لعام ٢٠١٩ بشأن الوظيفة والهيكل التنظيمي والواجبات والمهام . هذا لأنه في تنفيذ الطرق في قرية أريوجدينج، PUPR وإجراءات العمل، خدمة تولونج أجونج العديد من العقبات، كان أحدها مشكلة في الميزانية لولاية تولونج أجونجPUPRواجه مكتب لتنفيذ إصلاحات الطرق، مما تسبب في عدم إمكانية إصلاح الطريق المتضرر حتى الآن. وفي الوقت نفسه، في الحوكمة الرشيدة في إعداد الميزانية، هناك مبادئ إعداد النقود الواردة في اللائحة الحكومية رقم ١٢ لعام ٢٠١٩ بشأن الإدارة المالية الإقليمية والتي تتكون من مبادئ شفافية الميزانية والمساءلة، وضبط الميزانية، عدالة الموازنة وكفاءتها وفعاليتها، ويتم إعداد الميزانية وفق نهج الأداء. وفي الوقت ، لا يزال إعداد الميزانية غير نفسه، في تنفيذ الطرق في قرية أريوجدينج، رجوتاعان، تولونج أجونج متوافق مع هذه المبادئ. ٣) انطلاقا من وجهة نظر عمليات طريق الفقه السياسى التي قام بها لا تتفق مع المبادئ الواردة في دراسة الفقه السياسى الدستوري، ل تولونج أجونجPUPRمكتب وهي مبدأ حقوق الدولة والتزاماتها الواردة في القرآن. – فقرة ٥٩ من سورة النساء توضح إشكالية العلاقة بين حقوق الدولة وواجباتها في تنفيذ الولاية الممنوحة لأهلها، وهو مبدأ العدل الموصوف في سورة النساء الآية ٥٨ وهي: عن الحكومة التي لم تتمكن من تنفيذ الولاية التي أوكلت إليها، ومبدأ الوصية. يصف "أمر المعروف ونهي المنكر" الوارد في سورة القرآن علي عمران الآية ١٠٤ الحكومة التي يجب أن تطيع القوانين واللوائح الحالية. وفي الوقت نفسه، فإن حكومة تولونج أجونج من ل تولونج أجونج من حيث التغلب على مشاكل الميزانية في إدارة الطرق في PUPRخلال خدمة قرية أريوجدينغ لم تكن قادرة على تنفيذ المبادئ الموضحة في الفقه سياسه دوتوريا.